



Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat

**Solusi Gres
Data Jamkes**

Semangat Perubahan



Nafas perubahan adalah positif: menuju sesuatu yang lebih baik. Itulah modal kami, untuk terus memperbaiki perwajahan dan isi majalah ini. Harapannya tentu saja terus meningkatkan kualitas.

Sayangnya tidak setiap perubahan disambut positif. Selalu ada selaksa kepentingan dan prasangka yang meliputi. Begitupun dengan penerbitan majalah ini. Tak lepas dari halangan dan rintangan.

Namun demikian, itu tak menyurutkan kami untuk terus mengusung semangat perubahan. Kami menganggapnya sebagai jamu yang semakin menguatkan dan menyegarkan kami. Kadang juga kami menganggapnya sebagai bumbu penyedap, yang membuat racikan majalah semakin lezat.

Tentu saja dalam kerangka semangat perubahan itu pula, kami sadar jika majalah ini masih banyak kekurangan. Untuk itu kritik, saran, dan masukan dari

pembaca sangat kami harapkan.

Dengan masukan dari pembaca sebagai penikmat racikan majalah, maka kami akan lebih mengetahui selera dan keinginan pembaca. Pengetahuan itulah yang akan membuat kami terus berinovasi agar semakin dekat dengan pembaca.

Kami juga mengucapkan terimakasih kepada pembaca dan berbagai pihak yang sudah memberikan masukan. Sangat, sangat berharga saran, ide, dan gagasannya. Kami menangkap semangat perubahan yang sama.

Berbagai rubrik baru, atas usulan berbagai pihak, sedang kami godok. Tentu saja dengan mempertimbangkan berbagai sisi dan aspek kelayakan dan kemampuan produksi. Semoga ke depan bisa menghasilkan inovasi-inovasi rubrik dan penggunaan teknologi informasi.

Dengan semangat perubahan dan perbaikan diri juga, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1441 H.

Pembina/Penasehat :

H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Drs. H. Subhan
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Pengarah :

Muklisin Nalahudin, SH, MH.
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

Munawir, SH.
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

Abdul Rohman
(Ketua Komisi 1)

Mad Saleh
(Ketua Komisi 2)

H. Hermanto, SH
(Ketua Komisi 3)

Drs. H. Rasida Edy Priatna, MM
(Ketua Komisi 4)

Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

Ikin Asikin, S.Sos, M.Si
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

Wakil Pimpinan Redaksi :

Drs. Raden Chaidir Susilaningrat
(Kabag persidangan)

Drs. H. Sucipto, MM
(Kabag Perundang-undangan)

Redaktur Pelaksana :

Mochammad Nurhiyana, S.STP., M.Si
(Kasubag Humas dan Protokol)

Redaksi Ahli :

S. Yudi

Penyunting :

Wiwin Winarti, S.IP
(Kasubag Rapat dan Risaiah)

Ardiles Afla Jatiwanto
(Kasubag Rumah Tangga)

Redaktur :

IA Fazri

Reporter :

Firman • Maulana • Adi • Yusuf • Mahardika

Fotografer :

Alfian

Desain Grafis :

Boyke Datu • Andri

Data dan Riset :

Oman • Ihsan

Distribusi :

Adiw

Korespondensi:

redaksi.cika@gmail.com

Penerbit :

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon

• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



04 | FOKUS

Single Data System: Solusi Gres Data Jamkes

6 | Puskesmas: Ujung Tombak Nan Kerap Kena Tembak



16 | KILAS

Memantau Jalan Rusak



18 | PUBLIKA

Usul TPA Sampah Tiap Desa



20 | LENSA

Berharap Harga Semanis Rasa Jagung



22 | DINAMIKA KOMISI

Siaga Dana Desa Hadapi Covid-19

23 | Arus Perjalanan Belum Patuhi Himbuan

24 | Pasar Belum Maksimal Terapkan Protokol Kesehatan

26 | Membenahi Tambang Menumpas Sampah



30 | PROFIL

Fraksi Partai Demokrat
Siap Pro Rakyat



32 | INSPIRASI

Bumdes Ciawigajah Menuju Kelas Gajah

36 | POTENSI

Wiskul Cirebon: Sudah Unik Butuh Turistik

Single Data System

Solusi Gres Data Jamkes

Pendataan bisa sia-sia bahkan berujung kisruh, jika tidak didukung sistem yang memadai. DPRD Kabupaten Cirebon punya cara yang diyakini ampuh menyelesaikan kusut data Jamkes.

Sarini (52) terpaksa, ketika petugas Puskesmas menyatakan kepesertaan JKN-KIS miliknya nonaktif. Niat untuk berobat pun berujung kecewa. Padahal, saat berobat Februari 2020 kepesertaannya masih aktif.

Warga Desa Gebang itu pun melapor ke petugas Puskesmas. Namun hingga kini belum ada kabar. "Tugas kami hanyalah mendata dan melaporkan," jelas Fajar Afriyan, Petugas Puskesmas Desa Gebang.

Sedikit beda dengan Sari-ni, Masniah (61) beserta anak bungsunya, Mohammad Akim (17), pun status Jamkes PBI (Penerima Bantuan Iuran)-nya nonaktif. Warga Desa Kreo, Kecamatan Klangeran, itu pun melaporkan ke Puskesmas. Sang petugas meneruskannya ke Dinsos.

"Ternyata sejak April non-aktif. Ketika kami konfirmasi ke Dinsos alasannya ada *double data*, sehingga sedang diperbaiki katanya. Namun sampai hari ini masih sama, belum aktif kembali. Padahal sudah kami daftarkan kembali ke DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, red) dan dikirim ke Dinsos," jelas Jihad Nurullah, Petugas Puskesmas Desa Kreo.

Selain status yang tiba-tiba nonaktif, warga juga menge-



Layanan kesehatan di Puskesmas

luhkan banyak yang secara sosial-ekonomi masuk kategori, namun belum mendapatkan PBI. Surwi (68) misalnya, ia terpaksa berhenti berdagang karena pandangannya terbatas. Sementara,

suaminya sejak 2018 kena stroke. "Saya harap secepatnya jadi, kalau sudah dapat kartu KIS, saya ingin operasi mata karena katarak," harapnya. Tentu saja harapan Surwi bukan tanpa



Masniah (61)

dasar. Ia sudah didata oleh petugas Puskesmas. Namun, hingga hari ini belum ada kabar.

Mengandalkan Puskesmas

Sejak 2019, kondisi ini sebenarnya disadari oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Kondisi sengkarut layanan Jamkes bermula dari Permendagri No. 33 tahun 2019 yang melarang penggunaan APBD untuk Jamkes. Sehingga penggunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) sebagai Jamkes dinonaktifkan.

Sebagai solusi, pemerintah daerah Kabupaten Cirebon mau tidak mau harus melakukan pendataan warga miskin yang belum terdaftar sebagai PBI BPJS. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, mengatakan kepada media setidaknya ada 330 ribu warga miskin pemilik SKTM yang belum belum terdaftar sebagai PBI BPJS.

Namun demikian penambahan tidak bisa serta merta dilakukan. Perlu dilakukan verifikasi dan validasi (Verval). "Validasi di lapangan masih dikerjakan Dinas Sosial," jelasnya.

Sebagai gambaran, semua data terkait terkait dengan kondisi sosial, kesehatan, dan pendidikan kini ditangani oleh

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT). Program ini melibatkan beberapa sektor: dinas kesehatan, sumah sakit daerah, dinas sosial dan dinas pendidikan dan kebudayaan. Dinas sosial sebagai *leading sector*

Pendataan di lapangan dikerjakan oleh Puskesmas atau Pusat Kesejahteraan Sosial, yang merupakan kepanjangan tangan SLRT. Jika SLRT di tingkat kabupaten/kota, Puskesmas di tingkat desa. Puskesmas inilah yang menjadi garda terdepan pembenahan data.

Tiap desa terdiri dari empat hingga lima petugas Puskesmas. Satu di antaranya menjadi koordinator. Status mereka hanyalah pekerja sosial, dengan upah per bulan Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu.

Di garda terdepan, Puskesmas berhadapan dengan berbagai masalah. Bahkan, masalah yang sejatinya tidak secara langsung berkaitan dengan pendataan. "Hampir tiap minggu ada saja warga yang mengadu, mengeluh, dan protes mengenai status PBI," jelas Afriyan.

Bahkan tak jarang yang berujung kisruh antar-warga. "Pernah suatu waktu ada kericuhan di salah satu blok. Penyebabnya salah informasi menganggap dirinya terdaftar sebagai penerima bantuan. Karena yang melakukan pendataan adalah puskesmas dipanggil lah saya," papar Ambari, Koordinator Puskesmas Pali-manan Barat.

Verval Terantuk NIK

Proses pendataan hingga verifikasi dan validasi ternyata bukan hal mudah. Hingga kini pemutakhiran data belum selesai. Kesalahan data banyak dijumpai. Hal ini pun diakui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cire-



Surwi (68)

bon, Dadang Suhendra.

"Iya memang banyak ditemukan di lapangan warga yang seharusnya tidak mendapatkan bansos, justru masuk ke dalam data penerima bansos. Saat itu memang kita dipacu oleh waktu. Karena waktu untuk verval yang diberikan oleh Pemprov Jabar sangat sedikit sekali," jelas Dadang kepada awak media.

Selain itu, ada juga kasus data ganda. Orang yang sudah terdaftar dimasukkan kembali. Ada juga orang yang sudah terdaftar, tiba-tiba nonaktif. Kasus lain yang juga tak kalah membuat masalah di lapangan adalah orang yang secara sosial-ekonomi layak mendapat PBI justru tertolak.

"Ada ajuan kami yang ditolak. Ketika kami tanya ke Dinsos, alasannya NIK tidak terdaftar, sehingga tidak bisa diverifikasi dan validasi. Setelah kita cek ke Disdukcapil ternyata sudah terdaftar, barulah setelah itu Dinsos memproses," jelas Rohmatu-soim, Koordinator Puskesmas Desa Kertasari.

Dari keterangan Rohmatu-soim menyiratkan seolah tidak ada koordinasi antar-lembaga pemerintah, terutama antara Dinsos dan Disdukcapil. Soal NIK ini Kadinsos pernah me-

ngungkapkan bahwa banyak warga yang tidak memiliki NIK.

“Ada 36 ribu NIK KK yang saat ini belum ditemukan oleh Disdukcapil. Sampai saat ini Disdukcapil belum bisa memberikan data itu kepada kami,” kata Dadang kepada awak media. Temuan ini sebenarnya dalam rangka penyaluran Bansos terkait Covid-19. Namun, di bawah SLRT/Puskesmas data yang sama juga digunakan untuk Jamkes.

Ketua Komisi III Hermanto sempat geram dengan kondisi tersebut. “Gila ini, puluhan ribu warga kabarnya tidak punya KK, tapi punya KTP. Ini situasi gawat, karena KK kebutuhan administrasi sehari-hari juga lah. Kadisdukcapil harus bertanggung jawab,” kata Hermanto.

Selang berapa hari setelah DPRD mempermasalahkan NIK, Kadinsos kembali memberikan keterangan. “Kami melibatkan operator dari Disdukcapil untuk melakukan pemadanan nomor. Operator ini memiliki akses untuk bisa terkoneksi dengan Kemendagri dan Kemensos. Akhirnya sejumlah nomor NIK tersebut bisa ditemukan,” ujar Dadang.

Meski masalah NIK diklaim sudah selesai namun untuk Jamkes perlu melibatkan pihak lain, seperti BPJS, RSUD, dan Dinkes. Upaya menyatukan data pun sudah dilakukan Komisi IV. “Kami sudah mengumpulkan semua stakeholder untuk mencocokkan data, agar cepat selesai, karena orang sakit tidak bisa menunggu,” jelas Ketua Komisi IV, Rasi-da Edy Priatna.

Single Data System

Sikap Disdukcapil sebenarnya bisa dipahami karena tidak semua institusi bisa mengakses data kependudukan. Dalam undang-undang administrasi



Layanan kesehatan di Puskesmas

-Alfian/ Cirebon Katon

“
Ujungnya masyarakat
bisa terlayani secara
maksimal dalam
mendapatkan fasilitas
kesehatan
”

kependudukan sudah diatur tentang perlindungan data rahasia pribadi.

Namun apakah dengan demikian hak rakyat untuk mendapatkan bantuan kesehatan atau sosial lainnya terhalangi? Harus ada payung hukum yang bisa menjadi solusi agar sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data tidak melanggar UU.

Kondisi ini dipahami betul oleh DPRD Kabupaten Cirebon. Sebagai solusi DPRD kini sedang menggodok payung hukum. Tentu saja berupa Perda, sesuai

kewenangannya. Raperda yang disiapkan adalah soal *Single Data System* (SDS).

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthfi, mengatakan fungsi Raperda ini sebagai payung hukum agar Jamkes terdata dengan baik. “Raperda ini bertujuan untuk memberikan ketepatan sasaran dalam memberikan bantuan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon,” jelasnya.

Dengan adanya payung hukum dan sistem terpadu yang disiapkan, diharapkan verval bisa berjalan dengan cepat. Akses data para pihak ke Disdukcapil pun bisa dijalankan secara sistem, dengan tetap melindungi kerahasiaan data.

Tentu saja SDS juga diharapkan bisa menguatkan peran Puskesmas, dan mempermudah kerja mereka. Sehingga berbagai permasalahan di lapangan bisa diminimalisasi. “Ujungnya masyarakat bisa terlayani secara maksimal dalam mendapatkan fasilitas kesehatan,” tandas Luthfi. •mol/ suf

Puskesmas Ujung Tombak Nan Kerap Kena Tembak

Puskesmas digadang-gadang mampu menyelesaikan kisruh data. Namun, sederet persoalan justru dihadapi mereka sebagai ujung tombak. Akankah sengkarut bisa terurai?



Jihad Nurullah, Petugas Puskesmas Desa Kreo, Kecamatan Klangeran, Kabupaten Cirebon, saat sedang menginput data penerima bantuan.

-Yusuf/ Cirebon Katon

Matahari belum juga meninggi. Pintu rumah Fajar Afriyan, Petugas Puskesmas Desa Gebang, tiba-tiba ada yang mengetuk. Sepertinya ada yang tidak beres. Afriyan menduga pasti ada hubungannya dengan pendataan warga.

Benar saja, seorang nenek didampingi kerabatnya menge-luhkan JKN-KIS kategori PBI

(Penerima Bantuan Iuran) milikny mendadak nonaktif. Tak hanya berkeluh, kadang diiringi kecurigaan dan omongan kurang pantas.

“Banyak yang nonaktif, terutama yang jompo. Hampir tiap minggu ada saja warga yang datang ke Puskesmas mengadu,” jelas Afriyan. Apa yang dialami Afriyan, juga menimpa hampir semua petugas Puskesmas.

Kena tembak begitulah para petugas Puskesmas menyebutnya. Padahal sejatinya mereka hanya petugas pendataan. Data itu dipakai atau tidak bukan kewenangan mereka.

Puskesmas atau Pusat Kesejahteraan Sosial merupakan kepanjangan tangan dari Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT). SLRT di tingkat kabupaten kota, sedangkan Puskesmas



Maiana/Cirebon Katon

Arifin (kanan), koordinator Puskesmas Desa Jemas Lor sedang menerima Cirebon Katon

di tingkat desa.

SLRT merupakan program terpadu yang melibatkan beberapa sektor: dinas kesehatan, sumah sakit daerah, dinas sosial dan dinas pendidikan dan kebudayaan. Dinas sosial sebagai *leading sector*. Ruang lingkup pendataan Puskesmas pada bidang kesehatan, sosial, dan pendidikan.

Data yang dianggap sebagai penyebab sengkaret pelaksanaan Jamkes pun kini mengandalkan Puskesmas untuk menguraikannya. Puskesmas menjadi ujung tombak, garda terdepan pembenahan data.

Sedikitnya ada tiga masalah Jamkes terkait dengan ketersediaan data. Pertama, ada banyak masyarakat yang berhak mendapat Jamkes tapi tidak terdata. Kedua, adanya data ganda, yang berdampak pada ker-

ugian anggaran negara, karena harus membayar dua kali lipat ke BPJS Kesehatan. Ketiga, banyak peserta Jamkes yang tiba-tiba statusnya nonaktif, padahal kondisinya masih layak untuk mendapatkan PBI.

Tiga masalah data itu kini dibenakan kepada Puskesmas. Namun, tugas mereka sebatas mendata, menerima aduan, dan mengajukan terkait permasalahan sosial. Data diajukan kepada dinas sosial dan lanjut ke pemerintah pusat. "Hanya sebatas mendata," tandas Koordinator Puskesmas di Desa Jemas Lor, Arifin.

Selaksa Masalah

Mendata kondisi masyarakat bukan tanpa kendala, sederet permasalahan mereka hadapi. Persoalan pertama, yakni terbatasnya jumlah personil dalam

puskesmas. "Jumlah kita hanya empat orang, sementara jumlah penduduk desa Palimanan Barat sangat banyak," jelas Ambari Koordinator Puskesmas Desa Palimanan Barat.

Kedua, terbatasnya pemahaman masyarakat. Masyarakat mengira bahwa setelah didata maka secara otomatis akan dapat bantuan. Sehingga tidak jarang petugas Puskesmas dianggap tidak adil dan tidak transparan.

"Masyarakat masih banyak yang mengira bahwa ketika didata dan diajukan secara otomatis dapat. Padahal belum tentu. Andaiapun datanya sudah diterima bahkan sudah mendapat kartu, belum tentu juga ada isinya," jelasnya.

Ketiga, masalah administrasi kependudukan yang tidak dimiliki masyarakat. "Ada jompo yang termasuk kategori perlu dibantu, namun tidak memiliki KTP dan KK," terang Arifin.

Keempat, dinamisasi keadaan ekonomi masyarakat. Meningkatnya jumlah pengangguran atau berkurangnya pendapatan masyarakat menjadi persoalan baru. Mereka yang sebelumnya tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuntut agar terdata. Kondisi semacam ini memaksa petugas Puskesmas bekerja lebih keras.

"Data awal yang tersedia sudah sangat lama, sehingga program yang diturunkan tidak tepat sasaran. Belum lagi gonta-gantinya format pendataan dari dinas sosial. Sampai saya dan tim bahkan seluruh Puskesmas mengerjakan sampai pagi, jam empat subuh baru pulang meninggalkan anak istri demi pendataan warganya masing-masing," terang Ambari.

"Tapi Alhamdulillahnya data yang dikerjakan sampai pagi itu tidak ada gunanya. Kenapa? Saya yang mengajukan data tapi keluaranya beda. Misalnya saya mengajukan si A tapi keluaranya Z. Nah terus si A tahu kalau

dia itu dapat, tapi pas akhirnya ternyata tidak dapat. Tapi Puskesmas tidak punya kebijakan, yang punya data itu adalah pemerintah," tegasnya.

Perbedaan data yang diajukan dengan data yang keluar menggiring opini negatif masyarakat terhadap petugas Puskesmas. Tidak sedikit yang berprasangka bahkan menghubungkannya dengan politik. "Katanya yang dapat pihaknya kuwu tidak dapat. Padahal itu tidak benar dan diluar dugaan," jelasnya.

Kelima, respon terhadap ajuan yang lambat dan menggantung. Puskesmas sebagai gerbang data sudah melaksanakan tugas dengan semestinya. Namun data yang dikirim tidak lantas mendapat respon dan kepastian. Persoalan ini tentu berdampak pada lambatnya layanan terhadap kebutuhan masyarakat.

Keenam, disinyalir adanya data yang tidak sinkron antara Dinsos dan Disdukcapil. Ini terungkap di proses verifikasi dan validasi data di Desa Kertasari, Kecamatan Weru. Saat pengajuan data baru sebanyak 320 orang, namun yang terverifikasi hanya 20 orang.

"Ketika kami tanya ke Dinsos, alasannya selalu sama, NIK-nya tidak terdaftar, sehingga tidak bisa diverifikasi dan validasi. Padahal, warga itu sudah memiliki e-KTP. Bahkan, ada satu kejadian pas ada yang sakit tidak dapat Jamkes, kita cek ke Disdukcapil sudah terdaftar, barulah setelah itu Dinsos memproses," jelas Rohmatussoim, Koordinator Puskesmas Desa Kertasari.

Kasus di Kertasari ini tentu menjadi catatan, bahwa sesungguhnya sengkaret data bukan hanya terjadi di tingkat desa. "Hal itu yang menjadi pertanyaan kami di Puskesmas, apakah memang Dinsos tidak berkoordinasi dengan Disdukcapil atau baru ketika ada masalah saja," ujarnya.

Perlu Teknologi Informasi

Dengan sederet persoalan di atas, petugas Puskesmas berharap agar pemerintah secara lebih serius membangun infrastruktur SLRT hingga ke tingkat desa. Sebagai ujung tombak mereka sangat rapuh baik secara kesejahteraan, maupun sarana pendukung akselerasi data.

Ironis, sebagai garda terdepan mereka bekerja tanpa ikatan. "Kita bekerja secara sosial, namun kita juga perlu untuk diperhatikan agar lebih sejahtera. Selama ini kita diberikan upah sebesar Rp 300.000 s/d 400.000 dalam satu bulan. Selain itu juga berharap ada semacam SK yang menguatkan posisi di Puskesmas," jelasnya.

Tanpa SK, posisi mereka bisa sewaktu-waktu diganti. Padahal tugas puskesmas harusnya berkesinambungan. "Beberapa rekan saya dari desa lain tidak sedikit yang diganti karena diduga berbeda pilihan saat pemilihan kuwu," ungkapnya.

Selain soal kesejahteraan, petugas Puskesmas juga berharap adanya akselerasi menyikapan

data terbaru yang mereka kirimkan. Selama respon ajuan tidak cepat dan tidak ada kejelasan, mereka merasa terbebani. "Saya itu sangat khawatir terutama soal ajuan kesehatan, jika tidak cepat ditanggapi takut terjadi lagi warga yang tidak tertolong" takutnya.

Dalam rangka mempercepat pemrosesan data mereka berharap proses pengajuan dari Puskesmas kepada dinas sosial bisa dilakukan secara *online*. Ini akan memangkas waktu perjalanan dan akses data yang lebih mudah. Data yang diajukan harus bisa masuk dan mengganti data lama yang tidak relevan. "Ini kan eranya teknologi informasi, data harus *online*," tandasnya.

Lambannya pemrosesan data di dinas terkait, ketidakpastian tindak lanjut, ikatan kerja para petugas tidak jelas, minimnya sarana, dan pengiriman data secara manual, sungguh menjadi catatan pilu. Apakah dengan sederet permasalahan tersebut masih bergantung pada Puskesmas dalam mengurai sengkaret data? •mol/ suf



Layanan kesehatan di Puskesmas

Alhan/Cirebon Katon

Mengurai Hingga Kusut Data Terakhir



Karut-marut pelaksanaan jaminan kesehatan (Jamkes) di Kabupaten Cirebon menjadi perhatian ketua komisi IV. Persoalan data ditengarai menjadi penyebabnya. Belum lagi, perubahan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang semakin menambah persoalan di lapangan.

Jika dulu, APBD boleh di-

gunakan untuk meng-cover masyarakat yang belum mendapat jamkes, tidak untuk sekarang. Sesuai Keputusan Presiden bahwa JKN menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui BPJS.

Padaahal, fakta dilapangan, masih banyak masyarakat pra sejahtera yang belum mendapat jaminan kesehatan nasional. Ini menjadi persoalan dilematis bagi

pemerintah daerah.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan kesehatan dan persoalannya di Kabupaten Cirebon. Redaksi **Cirebon Katon** mewawancari ketua komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, H. Rasida Edy Priatna. Berikut petikannya:



Bagaimana penyelenggaraan jaminan kesehatan di Kabupaten Cirebon?

Pelaksanaan jaminan kesehatan di Kabupaten Cirebon terhambat oleh masalah pendataan. Data seharusnya tepat sasaran untuk yang berhak. Sebab terdapat data JKN ganda, sehingga ada masyarakat berhak namun tidak dapat. Ada juga data yang alamatnya tidak jelas dan sudah meninggal, namun masih tercatat.

Setidaknya terdapat sekitar 4.000 data bermasalah. Saya bertanya kepada pihak BPJS, jika terdapat peserta JKN tanggungan daerah dengan data bermasalah apakah bisa diganti dengan yang lain? Pihak BPJS menyatakan tidak bisa.

Sejauh mana pentingnya akurasi data?

Penting, sebab pelaksanaan jaminan kesehatan berpatokan pada data. Harusnya data dalam jaminan kesehatan dapat terkontrol *by name by address*. Dinas kesehatan dan Dinas Sosial harus mengecek dan mencocokkan data, agar tidak ganda. Mereka bisa mengecek melalui kartu jika memang ada. Persoalan lainnya muncul ketika banyak peserta JKN yang dinonaktifkan.

Apakah ada Perda yang mengatur tentang jaminan kesehatan di Kabupaten Cirebon?

Ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016. Namun saat ini Jaminan Kesehatan sudah menjadi program nasional dan

undang-undang. Tinggal pelaksanaan di bawah, terutama persoalan data.

Bagaimana peran legislator atas persoalan jaminan kesehatan?

Kami dari Komisi IV mengundang pihak Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan pihak BPJS. Duduk Bersama untuk mencari solusi. Jika masalahnya adalah data, maka ketiganya harus saling berkoordinasi. Melakukan pengecekan dan pencocokan data.

Selain masalah data, terdapat 160.000 peserta JKN yang dinonaktifkan. Maka harus segera dicari solusi. Misalnya melakukan pengusulan baru. Pengusulan data baru dilakukan sesuai alur. Komisi IV akan melakukan pengawasan setiap proses yang dijalankan.

Sejauh mana pengawasan dijalankan?

Legislatif terus melakukan pengawasan dan memantau kinerja dinas terkait. Mereka terus melakukan pendataan melalui Puskesmas. Dibantu oleh para pendamping, baik PKH maupun BPNT, ya kita awasi sampai ke bawah, kita urai hingga yang paling ujung, paling akhir.

Selain itu, kami juga mengundang Forum Kuwu Kabupaten Cirebon. Meminta agar para kuwu membantu, sebab ini terkait masyarakatnya. Mengarahkan dinas sosial dan dinas kesehatan agar selalu bekerjasama, jangan saling melempar dan

mencari kesalahan.

Pernah juga melakukan koordinasi bertempat di Paseban. Terdapat perwakilan dari dinas sosial, dinas kesehatan, dan BPJS. Mereka harus saling mengevaluasi. Misalnya untuk BPJS, jangan sampai terjadi *double* premi pada satu data. Sebab merugikan pemerintah Kabupaten Cirebon.

Sebetulnya jika tidak ada Kepres tentang Jaminan Kesehatan yang harus melalui BPJS. Lebih baik persoalan jaminan kesehatan masyarakat yang berhak dan belum *tercover* cukup menggunakan SKTM dan ditanggung APBD. Namun, dengan Kepres tersebut kita harus patuh dan tunduk.

Bagaimana jika ada masyarakat sakit namun jaminan kesehatannya nonaktif?

Kami pernah bertanya soal apakah ada sosialisasi dari BPJS dan Dinas Sosial tentang peserta yang dinonaktifkan. Ternyata tidak ada sosialisasi. Sehingga masyarakat *klubukan* dan kami pun kewalahan. Akhirnya masyarakat mandiri. Kalau dibebankan rumah sakit kasihan.

Jika satu orang, dua orang tidak masalah, tapi kalau ribuan? Tentu tidak bisa.

Secara anggaran apakah peserta JKN yang nonaktif bisa dibantu pemerintah daerah?

Jika melihat Permendagri No 33 Tahun 2019 Jaminan Sosial adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan tidak boleh dianggarkan dari APBD, karena harus satu pintu. Maka yang bisa dilakukan adalah meminta dinas sosial agar segera menyelesaikan pendataan terutama bagi yang tidak mampu.

Mengusulkan kembali masyarakat yang dinonaktifkan melalui puskesmas, ditandatangani kepala desa, camat, kemudian di kirim ke email dinas sosial. Jika lebih dari 4.000, maka diusulkan ke pemerintah pusat. Pada bulan Maret terdapat 250.000-an yang dinonaktifkan. Tentu jumlah yang tidak sedikit.

Bagaimana upaya pemerintah daerah menyelesaikan masalah tersebut?

Dinas kesehatan dan dinas sosial sebagai *leading sector* sedang melakukan pendataan

ulang bersumber dari dari puskesmas. Kami terus melakukan pengawasan, sejauh mana *progress* pendataan tersebut.

Akhir Desember 2019 baru 52%, itu pun belum tentu valid. Karena harus dicek NIK-nya terlebih dahulu. Sebab jika tidak sama, maka akan dicoret oleh kementerian sosial. Bekerjasama dengan Kemendagri yang memiliki kewenangan soal NIK.

Ada gagasan atau terobosan lain Pak?

Sebetulnya kami dari komisi IV sudah jauh melangkah sebelum ribut soal kisruhnya jaminan kesehatan. Kami meminta kepada bupati agar ada dana tanggap darurat nyawa. Tapi orang-orang menertawakan ketika saya berbicara tentang darurat nyawa.

Usulan tersebut adalah sebagai jawaban atas persoalan 160.000 masyarakat apabila dinonaktifkan. Belum lama saya berbicara soal dana darurat nyawa, *jebred* permasalahan Covid-19. Padahal jika sudah disiapkan dana tersebut, meskipun saat ini menghadapi Covid-19 jaminan kesehatan tidak terpengaruh karena sudah siap dananya.

Menarik tentang dana darurat nyawa. Apakah Sudah disetujui?

Kami sebatas mengusulkan tentang dana darurat nyawa tersebut. Kami meminta kepada bupati, ke dinas sosial dan dinas kesehatan. Soal dilaksanakan atau tidak itu wewenang eksekutif. Sepanjang untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Cirebon terutama masyarakat pra sejahtera, DPRD tidak pernah menolak dan pasti disetujui. Berapa anggarannya, eksekutif yang punya. •mol



#	Unit	Nomor Telepon
1	Polresta Kab. Cirebon	0231-204466
2	Polres Cirebon Kota	0231-205179
3	Pemadam Kebakaran Kab. Cirebon	0231-638249
4	Pemadam Kebakaran Kota	0231-484113
5	Ambulance	0231-206330 ext.1042
6	Pos SAR Cirebon	0231-8356347
7	Unit Transfusi Darah PMI Kota	0231-204964
8	Unit Donor Darah PMI Kota	0231-201003
9	Pengaduan PLN Kota Cirebon	0231-236551
10	Pengaduan Gangguan PDAM	0231-244222
11	PDAM Tirtajati (Sumber)	0231-321457
12	PDAM Kota Cirebon	0231-204800
13	Pengaduan Gas Kota Cirebon	0231-203323
14	Terminal Bis Harjamukti	0231-248902
15	Stasiun Kejaksan	0231-210444
16	Stasiun Parujakan	0231-202577
17	RSUD Arjawinangun	0231-358335 / 359090
18	RSUD Gunung Jati	0231-206-330
19	RSUD Waled	0231-661126; IGD: 0231-661275
20	RSIA Sumber Kasih	0231-203815
21	RS Ciremai	0231-238335
22	RS Hasna Medika	0231-343405; IGD: 0231-8825010
23	RS Mitra Plumbon	0231-323100
24	RS Pelabuhan	0231-230024 / 205657
25	RS Permata	0231-8338877 / 8338899; IGD 0231-8338881
26	RS Pertamina Klayon	0231-224797 / 224798; IGD: 08112433338
27	RS Putra Bahagia	0231-485654
28	RS Sumber Urip	0231-8302689
29	RS Sumber Waras	0231-341079

Memastikan Desa Siaga Covid-19

Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi Desa Kalimekar, Gebang, dan Desa Plumbon dalam rangka pencegahan dini penyebaran Covid-19. Rombongan komisi I menyaksikan pendataan warga yang mudik dan persiapan dana desa untuk antisipasi Covid-19.



-Foto: foto dok setiawan

Menyaksikan Pelaksanaan Sewa Aset Pemda

Wakil Ketua Komisi II Drs H Ridwan mengunjungi Kantor Kecamatan Kedawung, untuk mengetahui pelaksanaan hasil sewa tanah aset Pemda. Hadir pula BKAD, Camat Kedawung, dan kuwu se-Kecamatan Kedawung.



-Foto: foto dok setiawan

Memantau Jalan Rusak

Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon memantau Jalan KH Wahid Hasyim, Lemah Abang, yang rusak parah. Terdapat beberapa lubang besar yang digenangi air, sehingga menimbulkan kemacetan panjang setiap harinya.



-foto foto dok sethwan

Memeriksa Kesiapan Hadapi Pasien Covid-19

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Rasida Edy Priatna bersama anggota mengunjungi Rumah Sakit Mitra Plumbon, dalam rangka melihat kesiapan rumah sakit menampung pasien Covid-19, dan memastikan APD lengkap



-foto foto dok sethwan

Usul TPA Sampah Tiap Desa



Tanya:

Assalamu'alaikum wr wb. Salam sejahtera buat kita semua. Sampah merupakan masalah lama yang hingga kini tak kunjung usai. Alih-alih ingin ada pengolahan sampah menjadi gas atau listrik, TPA saja masih belum tersedia.

Seperti di sekitar jalan Gebang Babakan, sangat banyak sampah berceceran di sekitar jalan. Alasannya sangat sederhana, karena memang belum ada tempat pembuangan akhir (TPA). Akhirnya, masyarakat sekitar masih membuang sampah di sekitar jalan.

Saya harap DPRD bisa mendorong dinas terkait atau membuat regulasi agar ada TPA yang layak di setiap desa atau minimal di setiap kecamatan. Karena disini sering kali terjadi kecelakaan motor, karena tergelincir sampah plastik.

Ketika sudah ada korban baru-lah ramai-ramai membersihkannya. Namun, sekarang menumpuk lagi, semoga bisa dibuatkan TPA secepat-

nya yang tidak dekat dengan jalan. Puryana (24) - Wiraswata - Karang Wangun, Babakan.

Jawab:

Wa'alaikum salam, Puryana. Terimakasih sudah berkirim surat. Mungkin yang dimaksud Puryana tempat pembuangan sementara (TPS) di tiap desa. TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengelolaan, dan atau tempat pengelolaan sampah terpadu atau akhir.

DPRD Kabupaten Cirebon juga punya keprihatinan yang sama. Masa sidang tahun ini kami sudah menyiapkan Raperda Pengelolaan Sampah. Ini jadi prioritas DPRD untuk segera diperda-kan.

Selain payung hukum berupa Perda, kami juga menghimbau agar masyarakat sama-sama menjaga kebersihan lingkungan.



Pantai Baru Penuh Sampah

Tanya:

Pantai Baru Gebang merupakan pantai yang berada di Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon.

Setiap menjelang ramadhan dan idul fitri, pantai ini menjadi salah satu rujukan untuk ri'yatul hilal oleh Kemenag Kabupaten Cirebon dan bahkan Provinsi Jawa Barat.

Tapi sejauh ini, kenapa tidak pernah ada renovasi dan rehabilitasi untuk pembenahan Pantai? Pantai terlihat kotor banyak sampah.

Jadi, saya harap pantai ini bisa ditata, syukur-syukur mendorong agar jadi tempat wisata. Slamet (27) - Gebang Mekar - Gebang

Jawab:

Terimakasih informasi dan usulannya. Semoga apa yang diharapkan bisa terwujud.

Jembatan Tidak Layak



Tanya:

Saya Risma (21), ingin menyampaikan usul perbaikan jembatan penghubung antara Desa Cigobang Wangi, Kecamatan Pasaleman, dengan Desa Sukadana, Kecamatan

Waled, yang masih menggunakan bahan dasar kayu. Jembatan ini berdiri sekitar 10 tahun yang lalu di atas Sungai Cisanggarung.

Lebar jembatan hanya 1,5 meter, membuat kami sering mengantri

ketika ingin melewati jembatan. Hanya bisa dilalui maksimal 2 kendaraan.

Belum lagi ketika musim penghujan, kondisi air sungai yang tinggi membuat membuat khawatir pengguna jembatan.

Saya harap Bpk/Ibu Dewan bisa meneruskan aspirasi kami, untuk bisa memperbaharui jembatan yang layak, lebih lebar dengan menggunakan bahan dasar beton ataupun baja. Terimakasih. Risma - Karyawan POM - Cigobang - Pasaleman.

Jawab:

Terimakasih Informasinya Risma. Kami akan pelajari lebih jauh, baik secara kewenangan maupun teknis.

Jalan Pabuaran-Ciledug Rusak

Tanya:

Salam hormat untuk seluruh Bapak/Ibu DPRD Kabupaten Cirebon.

Saya Fauzan warga Tenjoma-ya yang setiap hari melewati jalur Pabuaran-Ciledug.

Jalan Pasar Sayur Pabuaran yang menjadi penghubung Kecamatan Pabuaran dan Ciledug, sampai hari ini rusak dan belum diperbaiki. Padahal jalan ini termasuk vital sebagai jalur utama yang sering dilewati angkutan umum elf dan bis.

Kerusakan sudah cukup parah sepanjang sekira 700 meter. Saya harap bisa secepatnya untuk diperbaiki dengan beton yang memadai, jangan dengan aspal tipis lagi agar bisa bertahan lama. Terimakasih Fauzan (23) - Mahasiswa - Ciledug.



Jawab:

Terimakasih Fauzan atas informasinya. Kami akan meneruskan ke dinas terkait, agar dapat diperbaiki secepatnya.

Redaksi menerima surat pembaca untuk dipublikasikan. Silakan kirim ke: redaksi.cika@gmail.com

Dengan melampirkan foto kartu identitas.

Tersedia Hadiah untuk tulisan yang dimuat

Berharap Harga Semanis Jagung

Tujuh puluh hari sudah mereka berikhtiar: pembibitan, penanaman, penyiraman, dan pemupukan. Kini waktunya panen. Dinihari, pukul 01.00 WIB, mereka menuju ladang. Udara dingin Desa Sumber, Kecamatan Babakan, tak menghalangi langkah mereka.

Semangat tapi pilu. "Harga jagung semakin turun. Hanya Rp 3.500 per kg," ungkap salah satu petani, Mashuri (28). Tentu saja tidak sebanding dengan biaya produksi. Harga yang tak manis rasa jagung. "Satu pohon hanya menghasilkan satu jagung. Belum lagi, hama tikus, ulat, menyebabkan kualitas jagung menurun. Dan tidak laku untuk dijual," ungkapnya.

Nasib jagung lokal kian merosot, disusul adanya impor jagung dari negeri tetangga. Pemerintah perlu hadir menjaga kestabilan harga. Agar manisnya jagung, mengiringi manisnya senyum sepanjang hari. @vik



Foto: foto Alfian / Cirebon Katon



Siaga Dana Desa Hadapi Covid-19



Foto doksetwan

Sejak awal Maret 2020, kasus terinfeksi Corona virus disease 2019 (Covid-19) atau virus corona terus meningkat. Pemerintah memutuskan pengalokasian dana desa untuk menangani wabah ini. Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon melakukan pemantauan di Desa Dompnyong Wetan. Mereka ingin mengetahui sejauh mana kesiapan yang dilakukan oleh pemerintah Desa dalam menangani wabah Covid-19.

“Kami ingin tahu bagaimana penggunaan APBDes untuk penanggulangan wabah ini, dengan harapan anggaran desa jadi lebih terarah”, ujar Rohman, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon.

Pemantauan ini juga berkaitan dengan pelaksanaan Surat Edaran (SE) Bupati Cirebon, tentang desa tanggap Covid-19 dan penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Menurutnya, ada tiga ruang lingkup surat tersebut. Pertama penegasan PTKD, desa tanggap Covid-19, dan penjelasan APBDes, jelasnya.

Menurut Warna, Kuwu Desa Dompnyong Wetan, mengatakan jajarannya sudah melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai tempat strategis, seperti mushala dan sekolah. Tetapi dengan menggunakan dana talangan. Karena ajuan untuk APBDes sendiri belum terselesaikan, katanya.

Kemudian upaya kedua, bagi warga yang pulang

dari perantauan, Pemdes sudah mencatat dan menyarankan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumahnya masing-masing. “Kita ingin pencegahan dengan mewajibkan warga yang baru pulang untuk isolasi”, tegasnya.

Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon berharap kepada kuwu beserta jajarannya, agar bisa mencadangkan dana desa dalam biaya tak terduga, yang disesuaikan dengan kemampuan desanya. Sehingga, nantinya sudah siap ketika ada hal yang tidak diinginkan berkaitan wabah ini.

“Kita belum tahu perkembangan pandemik di Kabupaten Cirebon kemudian hari, tetapi akan berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga minimalnya kita punya cadangan dana, yang nantinya akan dialokasikan sesuai kebutuhan” kata Rohman.

Rohman, juga meminta kepada jajaran Pemdes untuk memetakan dan menginventarisasi secara tepat terkait dengan kondisi sosial masyarakatnya.

“Ini penting, selain untuk bisa mengetahui warganya yang telah melakukan perjalanan atau tidak. Ini berguna untuk pendataan bantuan sosial yang nantinya akan didistribusikan ke desa langsung, pungkasnya”.

•Suf

Arus Perjalanan Belum Patuhi Himbauan



Foto: sufi/cirebon katon

Pergerakan manusia adalah kunci dari penyebaran Covid-19. Semakin banyak bergerak dan berkumpul, potensi penyebarannya semakin besar. Komisi III pun memastikan agar pergerakan warga benar-benar memakai protokol yang sudah ditentukan.

Sasaran pertama yang dipantau Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon adalah terminal dan pintu tol. “Kami pantau arus mudik, itu kan pintu masuk wilayah. Kita ingin agar orang yang dalam kondisi sehat, bersih dari virus”, jelas Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto.

Komisi II memulai kunjungan di terminal Losari yang menjadi wilayah perbatasan antara Provinsi Jabar dan Jateng. Selain Losari, terminallainnya yang dipantau adalah Ciledug. “Terpantau masih sepi pemudik, hanya ada beberapa bus dan truk”, jelasnya.

Pemantauan arus mudik juga dilakukan di pintu tol Palimanan. Arus mudik mulai ramai. Ada peningkatan sekira 200 persen. Kebanyakan pemudik memilih kendaraan pribadi.

Meski di pintu tol Palimanan sudah ada pos bantuan penanganan Covid-19, sayangnya belum dilengkapi dengan peralatan yang memadai. “Masih kurangnya alat untuk pengecekan dalam usaha penyempitan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Cirebon”, ujar Hermanto.

Sedangkan di pintu tol Plumbon, terpantau belum ada pos polisi untuk penanganan Covid-19.

“Hal ini tentu bisa menjadi peluang melintas untuk pendatang yang dari luar kota, tanpa pemeriksaan dan tanpa protokol kesehatan”, jelasnya.

Sejauh ini pelaksanaan *check point* di Kabupaten Cirebon terus digelar. Dalam kegiatannya petugas menyemprot cairan disinfektan dan pengecekan suhu tubuh pemudik.

Petugas pencegahan covid 19 tidak akan memilih opsi menutup pintu tol untuk membendung arus mudik. Dikarenakan akses jalan tol masih dibutuhkan untuk angkutan logistik seperti kebutuhan pokok, bahan bakar dan lainnya.

Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon pun melakukan pemantauan mobilitas warga dalam menggunakan kendaraan umum, baik Angkutan kota (Angkot) dan Angkutan desa (Angdes) di wilayah Kecamatan Weru.

Namun, kata Hermanto masih banyak warga yang mengabaikan himbauan dari Pemerintah yang dilakukan dalam penggunaan kendaraan umum. Juga tidak menjaga jarak posisi duduk antar-penumpang dan supir kendaraan umum, serta tidak membatasi jumlah penumpang kendaraan umum.

“Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon, saya harap untuk sementara di rumah saja, tidak melakukan interaksi terlebih dahulu dengan saudara yang di luar kota, dan tidak melakukan kegiatan mudik guna mencegah penyebaran virus Covid-19,” harapnya.

•suf

Pasar Belum Maksimal Terapkan Protokol Kesehatan

Sebaran Covid-19 semakin mengkhawatirkan. Terutama jika menyentuh pusat kegiatan masyarakat, terutama pasar tradisional. Menyadari hal itu, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon bergerak cepat. Sejumlah pasar mereka sidak, memastikan protokol kesehatan diterapkan.

Pasar yang disidak oleh Komisi II diantaranya : Pasar Tegalgubug, Pasar Minggu Palimanan, Pasar Plumbon, Pasar Batik Weru, Pasar Pasalaran Weru, Pasar Kue Weru, Pasar Mundu, Pasar Gebang, Pasar Babakan, Pasar Ciledug, Pasar Pabuaran, Pasar Cipeujeuh, Pasar Lemahabang, dan Pasar Jamblang.

“Pasar yang kami kunjungi, merupakan pasar rawan penyebaran Covid-19, karena, angka keramaiannya sangat tinggi,” ujar Mad Saleh, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon.

Pasar Tegal Gubug, misalnya, menjelang Ramadhan biasanya pengunjung meningkat 95 % dibandingkan hari biasa. Bahkan, pembeli grosiran yang datang berasal dari luar Cirebon, seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan.

Setelah pemberlakuan PSBB di wilayah Jawa Barat, pengunjung dari luar Cirebon yang datang ke Pasar Tegalgubug memang berkurang. “Kita lihat, memang jumlah pengunjung luar Cirebon, sangat sedikit karena aturan PSBB, namun pengunjung lokal masih banyak,” tegasnya.



-foto-foto dok setwan

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Subhan, menyampaikan, bahwa pengelola pasar telah melakukan himbauan kepada para pedagang dan pembeli untuk menggunakan masker, dan menjaga jarak 1 meter dengan orang lain. Para pedagang juga diminta untuk menyediakan alat cuci tangan dan *hand sanitizer* di masing-masing kiosnya.

“Selain itu, para pengunjung pasar yang masuk ke Pasar

Tegalgubug juga disemprot disinfektan yang aman bagi manusia untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” papar Subhan.

Setelah itu, komisi II juga berkunjung ke Pasar Minggu Palimanan. Berbeda dengan pasar Tegalgubug, di Pasar Minggu Palimanan sudah terpampang spanduk informasi mengenai Covid-19. Terpampang juga himbauan pemerintah dalam rangka penanggulangan wabah, dan tersedianya tempat cuci tangan di

pintu masuk pasar.

“Ini menandakan kesiapan pengelola dalam rangka pencegahan dan memberikan informasi edukasi kepada masyarakat, khususnya pengunjung pasar,” kata Mad Saleh.

Namun sejauh ini, menurut Mad Saleh lagi-lagi permasalahan tidak jauh berbeda dengan Pasar Tegalgubug. “Jumlah tempat cuci tangan masih minim dan hanya ada di pintu masuk, mengakibatkan banyak pengunjung maupun para pembeli yang tidak melakukan cuci tangan karena harus mengantri lama,” keluhnya.

Untuk itu Mad Saleh berharap pengelola agar lebih serius pencegah penyebaran wabah. “Kita minta pihak pengelola untuk menambah wastafel sebanyak mungkin, sehingga para pengunjung tidak ada alasan untuk tidak cuci tangan,” pintanya.

Sementara itu, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon

merasa sangat prihatin ketika berkunjung ke Pasar Plumbon. “Sedikit sekali penjual yang memakai masker dan tidak adanya spanduk informasi dan sarana prasarana tempat cuci tangan, ungkapnya.

Mad saleh meminta agar pemerintah daerah lebih sigap. “Ini merupakan catatan bagi Pemda bahwa kinerja dinas terkait perlu evaluasi kembali, terutama upaya preventif pandemi di sektor pasar,” kata Mad Saleh.

Hal serupa juga terjadi di Pasar Batik Trusmi, Weru: belum tersedianya wastafel. Anehnya pedagang justru berasal tidak menyediakan tempat cuci tangan karena pengunjung sedikit. “Rata-rata para pedagang enggan menyediakan tempat cuci tangan, karena pengunjungnya juga sedikit,” ujarnya.

Mad Saleh menyimpulkan bahwa selama *monitoring* di berbagai pasar yang ada di Kabupaten Cirebon, permasalahan



cenderung sama: belum maksimalnya sarpras kebersihan bagi para penghuni pasar. Ia berharap agar bupati bisa lebih konkrit lagi memberi solusi terkait upaya mitigasi corona di pasar dan swalayan.

“Kita ingin, selain kebijakan pembatasan jam operasional untuk pasar, pemerintah daerah bisa memberi fasilitas kebersihan guna mencegah penyebaran virus corona di seluruh pasar di Kabupaten Cirebon,” pungkasnya.

Kegiatan sidak ini, diikuti oleh seluruh jajaran anggota Komisi II yakni : Mad Saleh (Ketua), Subhan (Wakil Ketua), Khanafi (Sekretaris), M Ridwan (Wakil Ketua), Emha Syahirul Alam (Anggota), Rohayati (Anggota), Mustofa (Anggota), Sofatilah (Anggota), R Cakra Suseno (Anggota), Munawir (Anggota), Titi Sumanti (Anggota), dan Mamat Surahmat (Anggota).

•suf



Membenahi Tambang Menumpas Sampah



Foto: foto dok. setman

Kenyamanan dan kerusakan lingkungan tak henti dikeluhkan masyarakat. Itu pulalah yang membuat Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon tak bosan terus *ngoprek*, alias *monitoring* lingkungan.

Kali ini memantau galian C di Astanajapura, dan sampah di Kecamatan Weru. Galian tambang tak berizin merusak lingkungan. Sedangkan, sampah mengganggu lingkungan.

Komisi III langsung mendatangi usaha pertambangan pasir CV Inti Mandiri Sadaya. Kunjungan ini dalam rangka pengawasan aktifitas usaha yang berdampak langsung terhadap lingkungan.

Idealnya, sebelum melakukan eksploitasi alam, diharuskan menempuh prosedur perizinan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Setelahnya itu, ujar Hermanto, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, baru dilakukan reklamasi terhadap lahan tersebut.

Salah satu prosedurnya adalah pemohon harus terlebih dahulu memiliki Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP). Salah satu syaratnya, adanya rekomendasi dari pemanfaatan ruang dari Kabupaten Cirebon.

Setelah WIUP ditetapkan, pemrakarsa atau pemohon harus mengantongi dulu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi. Setelah eksplorasi dilakukan, pemohon harus menyusun studi kelayakan yang berisi kelayakan secara teknis, ekonomis, dan lingkungan.

Jika hasil studi kelayakan tersebut memungkinkan untuk dilakukan kegiatan penambangan, maka



selanjutnya yang bersangkutan harus mengajukan permohonan peningkatan status menjadi IUP Operasi Produksi. Persyaratannya: studi kelayakan, ijin lingkungan, rencana reklamasi dan rencana pasca tambang. Setelah semua itu baru bisa melakukan kegiatan penambangan atau penggalian.

Namun, dalam kegiatan *monitoring* tersebut tidak dijumpai pemilik usaha pertambangan pasir yang masuk dalam wilayah Desa Munjul Kecamatan Astanajapura. Komisi III hanya ditemui penjaga usaha tersebut.

Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon berharap pelaku usaha pertambangan dapat mematuhi aturan dan tidak merusak alam. Hermanto juga menghimbau, agar dinas terkait senantiasa melakukan pengawasan yang ketat.

Dalam sidak monitoring ini, Hermanto ditemani Syahril Romadhony, Mahmud Jawa, Darussa, Hanifah, Carila Rohandi, Anton Maulana, Mulus Trisla Ageng, Eryati, Teti Suhaeti, Nova Fikrotushofiyah, dan Muklisin Nalahudin.

Komisi III juga terus menginventarisasi masalah pengelolaan

sampah. Saat berkunjung ke kawasan Weru tumpukan sampah menjadi pemandangan. "Bau menyengat, sampah membukit. Jelas ini membahayakan kesehatan," ujar Hermanto, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon.

Tumpukan sampah liar ini, kata Hermanto, berasal dari kurangnya rasa kesadaran warga sekitar yang membuang sampah sembarangan di lokasi Desa Weru Lor Kecamatan Weru.

"Menurut para pedagang yang tidak jauh dari lokasi sampah tersebut menjelaskan bahwa yang membuang sampah mayoritas bukan dari pedagang, melainkan warga sekitar dan tetangga Desa yang kerap membuang sampah pada malam hari," jelasnya.

"Kalau malam hari, banyak warga tetangga desa yang membuang sampah di situ," kata salahsatu seorang pedagang menimpali.

Para Pedagang dan warga sekitar berharap, Pemerintah Kabupaten Cirebon bisa memberi solusi secepatnya dengan dibersihkan dan diratakan. Serta melakukan pemagaran, agar tidak ada lagi yang membuang

sampah di lokasi tersebut.

Sejauh ini, Menurut Hermanto, Penanganan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), adalah dengan pengangkutan sampah yang dilakukan setiap hari.

"Pengangkutan sampah itu belum efektif, karna paginya diangkut malamnya diisi lagi. Ini karena tidak sebanding antara armada yang digunakan untuk mengangkut dengan volume sampah yang ada," ujarnya.

Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, akan mendorong Dinas Lingkungan Hidup agar segera menangani permasalahan sampah dengan upaya lebih konkrit lagi. "Agar tidak ada lagi pembuangan sampah liar, dan armada mencukupi," tandasnya.

Hermanto bersama seluruh anggota Komisi III, juga meminta kepada masyarakat sekitar agar ikut peran serta dengan cara menjaga lingkungan, dengan tidak membuang sampah yang bukan pada tempatnya.

"Peran masyarakat paling penting, karena kalau kesadarannya rendah, ya percuma juga, karena sampah itu masalah yang harus dilakukan secara kooperatif oleh kita semua," pungkasnya. •suf

Fraksi Partai Demokrat Siap Pro Rakyat

Memperjuangkan aspirasi, dan mewajibkan anggotanya membaca literasi agar tajam memberi solusi, menjadi kiat FPD untuk terus pro rakyat.



**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN CIREBON**



Foto: foto Alifan Cirebon katon

Tegak lurus terhadap garis partai, Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Kabupaten Cirebon pun berposisi siap. Setiap anggota FPD siap mempersembahkan kinerja yang pro rakyat. Tentu saja mereka pun siap menampung keluh kesah rakyat.

Keluhan dan aspirasi yang biasa mereka terima dari masyarakat lebih banyak menyangkut kebutuhan administrasi, seperti pembuatan KTP, KK, dan lainnya. Masyarakat merasa kesulitan mendapatkan administrasi tersebut. Maka sebagai wakil rakyat, mereka menindak lanjuti keluhan masyarakat ke dinas terkait.

Ketiadaan blanko menjadi penyebab lambatnya pembuatan KTP. Maka komisi I yang berkenaan langsung dengan dinas kependudukan dan catatan sipil melakukan koordinasi. Memastikan agar masalah tersebut dapat segera diselesaikan.

Selain masalah administrasi, keluhan masyarakat umumnya terkait dengan infrastruktur jalan. Kondisi jalan berlubang yang tidak jarang memakan korban menjadi sorotan masyarakat. Keluhan tersebut ditanggapi dan dilanjutkan ke dinas terkait agar segera di lakukan perbaikan.

Berkenaan dengan infrastruktur jalan, secara tanggung jawab terbagi dalam beberapa kategori. Ada jalan Desa, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional. Setiap ruas jalan tersebut berada dalam tanggung jawab masing-masing tingkatan pemerintahan. Tugas anggota dewan adalah mengkoordinasikan dan memastikan

agar persoalan jalan berlubang terselesaikan.

Banyak lagi persoalan yang ditampung oleh dewan dari PD pada saat melakukan reses atau kunjungan. Seperti masalah sungai, pertanian, dan sebagainya. Setiap persoalan tersebut dibahas sesuai komisi yang ditempati oleh setiap anggota dewan. "Alhamdulillah anggota dewan kita berada disemua komisi, sehingga bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat" pungkasnya.

Fraksi PD senantiasa melakukan pertemuan rutin khusus membahas isu-isu kekinian. Hal itu dimaksudkan agar program pro rakyat dapat terwujud. Selain itu, Ketua Fraksi mengingatkan kepada anggota dewan PD agar selalu membaca berbagai literasi. Hal ini dimaksud agar mereka lebih tajam dalam memahami setiap persoalan dan memberi solusi.

Muklisin Nalahudin

Sepakbola Sang Nahkoda FPD

Pemilik nama lengkap Muklisin Nalahudin, S.H, M.H ini sangat gemar berolahraga, terutama sepak bola. Bahkan, sebelum menjadi anggota dewan, ia pernah secara mandiri menyelenggarakan turnamen sepak bola. "Saya pernah membuat turnamen sepak bola pada tahun 2012," ungkapnya.

Kecintaannya terhadap sepak bola bukan tanpa alasan. Baginya sepak bola adalah simbol kesamaan derajat. "Saya suka sepak bola sebab merupakan olah raga yang murah dan digandrungi oleh seluruh lapisan masyarakat," jelasnya. Sepak bola adalah olah raga yang dapat dilakukan oleh siapapun dengan biaya murah,

Sepak bola juga memiliki makna sebuah kerjasama. Posisi setiap pemain memberikan andil besar terhadap kemenangan. "Sepak bola memerlukan ker-



jasama, harus kompak, dan saling bersinergi untuk mencapai visi misi," ungkapnya. Filosofi sepak bola tersebut menghantarkannya pada posisi saat ini.

Ada insiden yang melekat di benaknya saat bermain sepak bola di sekolah dasar. Kerasnya pertandingan membuat celananya ditarik hingga kedodoran. Peristiwa lainnya terjadi saat SMP. Ketika ia menendang, bukan bola yang melambung, namun justru sepatunya yang terbang mengenai lawan.

Itulah sepotong kenangan

masa kecilnya dengan sepakbola. Bagaimana dengan klub atau negara kesukaanya? "Kalau sepak bola antar negara, saya suka Portugal. Meskipun belum pernah menjadi juara dunia tapi pernah menjadi juara Eropa. Banyak bintang sepak bola seperti Critiano Ronaldo dan lain-lain," jelasnya.

Kegemarannya terhadap sepak bola berlangsung hingga kini. Ia kerap menyempatkan bermain sepak bola atau futsal. Bahkan saat kami menemuinya, ia sempat mengajak bermain

futsal. "Enaknya kita main futsal, tapi kondisi lagi begini (pandemi covid-19, red) jadi mungkin nanti," ajaknya.

Memiliki *background* pendidikan sarjana hukum dan magister hukum tata negara, saat ini ia dipercaya menjadi ketua

Bapemperda (Badan Pembentuk Peraturan Daerah). Ia pun memiliki tekad dan semangat belajar tinggi. "Inshaallah ada rencana lanjut S3 dan terus berjuang untuk masyarakat," pungkasnya.

Selain menjadi ketua fraksi dan Bapemperda, ia juga

dipercaya menahkodai Partai Demokrat Kabupaten Cirebon. Sebuah tugas yang harus dilaksanakan dengan penuh kerja keras. Berjuang untuk masyarakat dan membesarkan Partai Demokrat sebagai rumahnya.

Anggota Fraksi Partai Demokrat

Hasil Pemilu 2019 telah mencatat lima anggota PD yang sukses menduduki kursi DPRD Kabupaten Cirebon. Dari tujuh Dapil yang ada, hanya dua tak terisi. "Kita ada lima orang dari tujuh Dapil, kosong di Dapil 5 dan 6," jelas Ketua Partai Demokrat. Berikut anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Partai Demokrat periode 2019-2024:



Dapil 1, Heri Yanto, ST. Ia merupakan politisi PD kelahiran Kabupaten Cirebon tanggal 21 Juli 1977. Saat ini menjadi anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon yang bergerak dalam bidang kesejahteraan rakyat.

05 Juli 1973, ia mendapat kepercayaan masyarakat menjadi anggota legislatif periode 2019-2024. Ia menempati Komisi III yang bergerak dalam bidang pembangunan.



Dapil 3, Muklisin Nalahudin, SH, MM. Ia merupakan Ketua Fraksi, ketua Bapemperda, dan berada di Komisi III. Ia juga dipercaya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon.



Dapil 2, di isi oleh H. Mahmud Jawa, SH. Sebagai putra daerah yang lahir pada tanggal

Dapil 4, di isi oleh Tarseni. Perempuan kelahiran Cirebon 09 Maret 1985 ini adalah satu-satunya dewan perempuan dari PD. Ia menempati Komisi I yang bergerak pada bidang pemerintahan.



Dapil 7, H. Mamat Surahmat. Ia merupakan politisi PD yang berhasil menduduki Gedung DPRD Kab. Cirebon untuk Periode 2019-2024. Saat ini ia menempati Komisi II yang bergerak dalam bidang perekonomian dan keuangan. Pria kelahiran Cirebon 52 tahun lalu tersebut menjadi dewan paling senior di Fraksi PD. •mol

Segenap Pimpinan dan Redaksi



Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat



Mengucapkan

**SELAMAT MENUNAIKAN
IBADAH PUASA RAMADHAN 1441 H**

Bumdes Ciawigajah Menuju Kelas Gajah

Bumdes Ciawigajah kini sudah menghasilkan Rp 150 juta per tahun. Berbagai unit usaha terus dibuka untuk mengejar target pendapatan Rp 3 miliar per tahun.



Foto: foto Alfian/Cirebon Katon

Ciawigajah, awal 2015. Kalaupun kuwu, juru tulis dan BPD tidak membuat keputusan besar pada waktu itu, mungkin desa di Kecamatan Beber ini bernasib seperti desa pada umumnya.

Desa yang berbatasan dengan Kabupaten Kuningan ini sudah berapa kali dikunjungi pejabat, dan menjadi pemberitaan nasional. Tentu saja karena desa berpenduduk 4.451 jiwa ini kini berbeda: sudah memiliki penghasilan asli desa (PAD) sendiri.

Kuwu Mutirah, Juru Tulis Abdul Rosyid, dan BPD, kala itu, membuat keputusan strategis: membuat badan usaha milik desa (Bumdes). Mitra Usaha Bangun Desa (MUBD) itulah nama yang mereka sematkan.

Bumdes dianggap sebagai solusi atas sumber daya alam yang melimpah. Sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Salah satu poten-



si desa kami adalah memiliki sumber mata air yang bagus dan melimpah," ujar Ketua Bumdes MUBD Ahmad Fauzi Bisri.

Pengurus Bumdes berpikir dan bekerja keras, menggali potensi desa yang ada. Musyawarah

dilakukan, dari sekian banyak potensi desa yang ada di Ciawigajah mana dulu yang akan dikembangkan. Akhirnya pemenuhan kebutuhan air bersih (Pamdes) yang menjadi pilihan pertama.

Pamdes pun mendapat sambutan yang luar biasa. Meski untuk mengalirkan air ke rumah harus mengeluarkan biaya Rp 700 ribu. Itu tidak menyurutkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program tersebut.

Kini sudah 700 kepala keluarga (KK) –dari 1.000 KK yang ditargetkan– yang menikmati Pamdes. Dengan tarif Rp 1.000 per kubik, rata-rata per-KK mampu menambah kas Bumdes Rp 10 ribu per bulan.

Sukses mengalirkan Pamdes, tak membuat mereka puas, malah tambah bersemangat untuk membuat unit usaha baru. Mereka pun memproduksi air minum dalam kemasan (AMDK) dengan merek *Ciawiwater*.

Lagi-lagi pasar menyambutnya antusias. Kemampuan produksi mesin produksi hanya 600 dus per hari, sedangkan permintaan pasar 3.000 dus perhari. Bumdes unit produksi AMDK pun berencana meningkatkan produksi secara bertahap.

"Kita akan meningkatkan produksi menjadi 700 dus per hari untuk memenuhi kebutuhan warga setempat. Sedangkan untuk memenuhi pasar global harus ada penambahan mesin produksi sambil menunggu proses perizinan sesuai standar nasional (SNI)," papar Bisri.

Bumdes terus menggeliat, unit-unit usaha baru pun terus dilahirkan: BRILink, koperasi simpan pinjam, dan warung sembako. BRILink untuk memudahkan masyarakat melakukan bermacam transaksi.

Sedangkan, koperasi beriuran wajib Rp 25 ribu per nasabah itu, itu juga membantu per modalan dan kebutuhan warga. Nasabah bisa meminjam Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta. Sementara, warung sembako kini telah berkembang menjadi pusat grosir untuk suplai ke warung kecil.

Tak hanya itu, Bumdes pun mengolah sampah rumah tangga menjadi sesuatu yang produktif. Sekitar



Produksi sampah organik



satu kilometer dari pemukiman warga, di area persawahan, tempat pengelolaan sampah mereka dirikan.

Setelah melalui proses pemilahan, sampah dibuat pupuk organik dan bahan baku batako. Bumdes juga mendapatkan pemasukan Rp 10 ribu per warga pengguna jasa pemungutan sampah.

Bumdes MUBD kini membukukan keuntungan Rp 150 juta per tahun. Sekira 30% hingga 40% dari keuntungan, atau sebesar Rp 60 juta, dialokasikan sebagai PAD. Sisanya digunakan untuk pengembangan usaha.

Keuntungan itu masih dianggap kecil, masih kelas 'teri'. Mereka mengingkan yang lebih besar lagi, menjadi Bumdes berkelas 'gajah'. "Pemdes bersama pengurus terus berusaha menggenjot Bumdes untuk mencapai target PAD Rp 3 milyar per tahun," jelasnya.

Sungguh angka yang menantang untuk sebuah Bumdes, namun bukan mustahil. Untuk mencapai itu pengembangan usaha terus dilakukan. Dua diantaranya adalah bidang ekowisata dan peternakan.

Arung jeram, bumi perkemahan, dan kolam renang yang menjadi pilihan pengembangan usaha di bidang ekowisata. Sedangkan unit usaha peternakan, akan belatung magot dari lalat tentara sebagai pakan ternak dan ikan. "Dari dua bidang tersebut diharapkan target yang direncanakan tercapai," tandasnya.

Kehadiran Bumdes dengan berbagai unit usaha, dapat memberikan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dapat mengurangi angka pengangguran. Jika Ciawigajah bisa, bagaimana dengan desa Anda? • **adi/fir**



Oleh : Maulana, S. Pd

Skema Reward Guru Honorer



Guru honorer berdemo

"Tapi mengapa gaji guru Oemar Bakri seperti dikebiri." Sepotong lirik lagu Iwan Fals ini seolah menjadi potret guru honorer: bergaji rendah, dan kurang sejahtera. Benarkah? Tidak, jika skema *reward* (penghargaan) dijalankan.

Guru honorer selama ini menjadi tanggungan pemerintah daerah. Besaran honor menjadi isu sensitif, baik bagi Pemda maupun guru. Bagi guru honorer, jelas yang didambakan adalah kesejahteraan. Sedangkan, dari sisi Pemda, persoalannya adalah keterbatasan anggaran.

Harus ada *win-win solution*, solusi yang

melegakan keduanya. Nah, skema *reward* bisa menjadi jembatan dan jawaban bagi dua persoalan ini.

Harus Tetap Berkualitas

Guru honorer tidak boleh cengeng dengan keadaan. Keterbatasan yang dihadapi perlu diubah menjadi sumber motivasi untuk mengembangkan kualitas diri. Mereka harus bisa membuktikan bahwa honorer hanya sebatas 'sandangan', bukan penyekat pengabdian. Sebab mendidik adalah tugas mulia bagi 'pahlawan tanpa tanda jasa'.

“

...bahwa honorer hanya sebatas 'sandangan', bukan penyekat pengabdian. Sebab mendidik adalah tugas mulia bagi 'pahlawan tanpa tanda jasa'.

”

Era digital dan internet harus dimanfaatkan oleh para guru honorer. Banyak hal bisa dilakukan untuk mengembangkan *skill* dalam mendidik. Misalnya *upgrade* metode pembelajaran berbasis teknologi informasi.

Produktivitas harus ditingkatkan. Mereka harus melek dan *update* informasi sebagai bahan mengajar. Dinamika sosial masyarakat harus diikuti. Ini menjadi modal agar materi yang mereka sampaikan di ruang kelas relevan dengan kehidupan para siswa. Mendorong siswa agar mampu berpikir dan tanggap terhadap permasalahan lingkungan sekitar.

Kreativitas harus dimiliki, tantangan Pendidikan abad ke-21 tentu berbeda dengan beberapa puluh tahun silam. Oleh karena itu, mereka harus mampu menciptakan pembelajaran dengan mengedepankan hasil berupa *creativity*, *communication skill*, *critical thinking*, dan *collaboration* yang dimiliki oleh para siswa.

Tenaga-tenaga guru honorer yang mayoritas masih usia muda harus menginisiasi pembaharuan. Menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dari proses Pendidikan.

Kesuksesan tidak akan tercipta dalam Pendidikan ketika orientasi 'pahlawan tanpa tanda jasa' hanya sebatas uang. Mereka harus memiliki visi misi lebih besar dari sekedar pendapatan. Sebab mereka adalah produsen yang menghasilkan beragam profesi; dokter, politisi, entrepreneur, hingga cendekiawan.

Menyiapkan Skema Reward

Skema *reward* merupakan pemberian insentif berdasarkan penghargaan. Langkah ini dapat dilakukan oleh Pemda dalam memberikan kesejahteraan kepada guru honorer. *Reward* berbeda dengan upah, karena *reward* diberikan hanya ketika ada sesuatu dinilai berprestasi.

Pemberian *reward* kepada guru honorer diberikan berdasarkan aktivitas yang menunjukkan sebuah prestasi yang patut diapresiasi. Aktivitas tersebut bisa berupa kompetisi dan nonkompetisi, yang berpengaruh pada perubahan positif dilingkungan sekolah ataupun masyarakat.

Reward berdasarkan kompetisi misalnya guru honorer mengikuti sebuah perlombaan di tingkat kabupaten hingga mancanegara. Baik lomba yang berkaitan dengan kependidikan ataupun non kependidikan. Bagi guru honorer yang menjadi pemenang 1, 2, atau 3, Pemda akan memberikan *reward*.

Reward nonkompetisi diberikan pada guru honorer yang melakukan kegiatan positif dan berdampak signifikan pada lingkungan sekolah atau masyarakat. Misalnya guru honorer menjadikan sekolah tempat mengajarnya sebagai basis sekolah sehat. Dia membuat taman tanaman obat serta berbagai indikator yang menunjukkan sekolah sehat.

Kegiatan tersebut merupakan inisiasi dan dilakukan secara langsung oleh guru honorer. Baik melibatkan seluruh elemen warga sekolah ataupun tidak. Dengan kegiatan yang dilakukan tersebut sekolah mendapat manfaat dan kemajuan. Prestasi nonkompetisi semacam ini kemudian direkomendasikan oleh kepala sekolah untuk diajukan ke Pemda.

Selain melakukan inisiasi kegiatan atau program di lingkungan sekolah, bisa juga di lingkungan masyarakat. Guru honorer membuat terobosan pengelolaan sampah. Bisa juga melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, keagamaan, dan budaya.

Program bisa dilakukan secara mandiri, tim, maupun kerjasama dengan pihak lain. Prestasi ini bisa diajukan oleh kepala desa kepada Pemda agar diberikan *reward*.

Memberikan *reward* semacam ini mampu memotivasi guru honorer agar memiliki kreativitas. Selain mendapat honor bulanan seperti yang telah berjalan, guru honorer berkesempatan mendapat uang dari *reward* dengan jumlah cukup besar. Sehingga skema *reward* ini memberi manfaat bagi Pemda dan guru honorer.

Skema ini memberi sumbangsih nyata bagi Pemda untuk kemajuan daerah. Melalui kreativitas dan terobosan guru honorer beberapa persoalan dapat teratasi. Kesan peduli pada nasib guru honorer pun dilakukan dengan upaya yang lebih elegan.

Redaksi menerima kiriman artikel opini untuk dipublikasikan. Silakan kirim artikel dilampiri foto KTP ke: redaksi.cika@gmail.com

Wiskul Cirebon

Sudah Unik Butuh Turistik

Wisata kuliner (Wiskul) di Cirebon makin tumbuh. Sayangnya belum tertata. Perlu sentuhan kekinian agar semakin melesat.



Foto: Alifan/Cirebon Katon

Wiskul di Cirebon sangat beragam. Unik-unik pula, mulai dari makanan utama, camilan, hingga minuman. Soal rasa, jangan ditanya, tentu khas dan *nendang* di lidah. Sebuah potensi wisata yang luar biasa.

Namun, unik dan rasa saja belum cukup untuk mejadikannya wiskul yang menyenangkan. Apa saja yang diperlukan agar potensi ini turut mendorong ekonomi daerah?

Sebelumnya, mari lihat lebih jauh kekayaan kuliner Cirebon. Ini tak terlepas dari status Cirebon di masa lalu, sebagai kota perdagangan dan bandar jalur sutra. "Cirebon ini kota tua, nah seperti kota tua lainnya, memiliki kekayaan kuliner yang luar biasa," jelas Akademisi IAIN Syekh Nurjati, Syaeful Badar.

Bahkan, keragaman kuliner di Cirebon, menurut Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori, lebih kaya dibanding Yogyakarta. "Kuliner kita itu sangat kompleks, lebih dari Yogyakarta. Sebut saja ada tahu gejrot, empal gentong, docang, nasi leng-

ko, nasi jamblang, mie koclok, pedesan entog, sate kentang, kerupuk melarat, aci dikoko, ampas tahu, es buah, dan sirup campolay," paparnya.

Selain itu, hampir setiap makanan khas di atas memiliki nilai historis. Nasi jamblang, misalnya, ciri khas godong jati berawal karena di sekitar Jamblang pada masa kolonial tidak ada wadah untuk mengirim makanan. "Akhirnya masyarakat Jamblang berinovasi dengan menggunakan godong jati sebagai wadah dan sampai saat ini menjadi ciri khas nasi jamblang," jelas Badar.

Senada dengan Badar, Basori juga melihat bahwa keanegaraman dan keunikan kuliner di Cirebon lahir dari peradaban dan kejayaan masa lalu. "Karena sejarah, budaya yang multikultur, dan adat itu melahirkan jenis makanan yang beragam dan bercitra rasa kuat," jelasnya.

Beragam, enak, dan unik, modal yang lebih dari cukup untuk menjadi wiskul. Namun, apa jadinya jika bahagia dan rileks sebagai ruh wisata berubah menjadi jengkel dan stres bagi wisatawan?



Nasi Jamblang



Empal Gentong

"Saya sudah dua kali muter tapi tidak dapat parkir. Padahal ini jalanan macet, saya belah-belain pengen makan empal gentong, apa daya gak dapat parkir. Jengkel sih, kita ini kan mau nyari makan bukan nyari parkir," ungkap Musthafa, penggemar wiskul, di kawasan Tengah Tani.

Apa yang dirasakan Musthafa mungkin juga dirasakan yang lain. Bahkan kemacetan berdampak pada pengguna jalan lain. Tentu saja ini merugikan kepentingan umum, dan pemborosan bahan bakar bagi pengguna jalan.

Jika sudah begitu masihkah disebut sebagai wiskul? Makanan unik adalah daya tarik, ia tetap butuh sentuhan turistik untuk menjadi wiskul. Pengelolaan yang mempertimbangkan aspek turisme: kemudahan ak-

ses, kenyamanan, suasana rileks (*leisure*), dan kebahagiaan.

Jika potensi yang luar biasa itu tidak dikelola dengan baik, bisa jadi akan tergerus oleh arus zaman. Tinta Gunawan (26), pedagang nasi lengko, mengungkapkan perlu adanya peran pemangku kebijakan yang membuat desain dan pola pengembangan potensi ini.

"Perlunya disediakan tempat berjualan khusus bagi pedagang kuliner yang di akomodasi pemerintah di setiap tempat wisata, saya lihat belum ada fokus wahana wisata kuliner khas Cirebon, masih cerai-berai, walaupun ada seperti empal gentong di Tengah Tani masih berjalan sendiri-sendiri," ujar sarjana ekonomi ini.

Selain pembuatan sentra kuliner, Tinta juga berharap pemerintah membuat pemetaan tempat kuliner. "Ini penting, hal

ini akan sangat membantu wisatawan agar mereka tak bingung, juga membantu pengusaha kuliner yang mandiri," paparnya.

Pemetaan ini akan lebih baik jika memanfaatkan teknologi informasi. Ini menyesuaikan dengan gaya hidup masyarakat saat ini. "Sediakan pula situs untuk mempromosikan kuliner-kuliner tersebut. Situs ini harus punya pemerintah daerah. Selama ini hal tersebut tidak tersedia di situs-situs wisata di daerah," ujarnya.

Basori juga melihat kunci penting pengembangan wisata kuliner terletak di pemerintah daerah. Sebab pemerintah daerah lah yang betul-betul mengetahui seluk-beluk makanan khas di wilayahnya masing-masing.

"Sekarang di Disbudparpora belum ada tim percepatan. Pemerintah daerah harus bergerak cepat mengembangkan wisata kuliner, harus mendata seluruh makanan-makanan lokal bersama dengan pihak-pihak terkait," jelasnya

Setelah itu, kata Basori, makanan-makanan tersebut dibuat paket-paket wisata kuliner. "Selanjutnya tiga kuliner terbaik yang memiliki cerita dan filosofi dipromosikan. Penentuan-penentuan kuliner ini harus melibatkan budayawan dan ahli kuliner yang benar-benar memahami cerita di balik kuliner tersebut," paparnya.

Menaraskan kuliner dengan sejarah dan filosofi yang melekat pada makanan itu akan semakin membuat makanan itu bernilai. Tentu saja berbagai upaya promosi lainnya juga perlu dilaksanakan. "Karena pengunjung kita itu secara status sosial bermacam-macam. Itu pun kalau serius ingin menjadikan kuliner sebagai wisata," tandas Tanti. •suf/ fal

Mohamad Luthfi



Dewan

Pernahkan Anda berpikir, bahwa setiap manusia adalah dewan? Tentu saja saya tidak sedang bercanda. Ini serius. Sebab, jika memahaminya, Anda akan menyadari sebuah kekuatan yang super dahsyat ada pada diri Anda.

Dewan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota. Pekerjaannya berunding, memberi nasihat, dan memutuskan sesuatu.

Merujuk pada definisi di atas, bisa dipastikan Anda seorang dewan bukan? Bukan lagi anggota, tapi dewan. Anda adalah badan, yang memiliki beberapa anggota, seperti tangan, kaki, mata, telinga, mulut, dst.

Bahkan, bisa jadi Anda itu adalah super dewan. Selain terdiri dari anggota yang kasat mata, dalam diri Anda juga ada yang tidak kasat mata: perasaan, emosi, nafsu, pikiran, hati, dan jiwa.

Belum lagi, kalau Anda berperan sebagai makhluk sosial. Maka, dalam diri Anda ada aspirasi orang lain. Jika seorang kepala keluarga, misalnya, maka ada aspirasi istri, anak, orang tua, hingga pembantu.

Itu baru satu peran. Bagaimana pula jika Anda memiliki banyak predikat, misalnya sebagai makhluk politik (politisi), pengusaha, ketua organisasi, hingga tokoh masyarakat/agama. Akan semakin banyak lagi aspirasi yang berelasi dengan Anda.

Sebagai sebuah dewan, pernahkan para anggota Anda berunding, bermusyawarah? Kalau Anda menjawab 'tidak', maka sungguh terlalu Anda ini. Bukan terlalu karena seumur hidup dewan kok gak pernah bermusyawarah, tapi terlalu kok bisa Anda tidak menyadarinya.

Sadarlah bahwa setiap keputusan tindakan dalam hari-hari Anda adalah sebuah hasil musyawarah para anggota. Baiklah, saya akan menjelaskannya pada Anda. Katakanlah Anda ingin memecahkan sebuah batu untuk kebutuhan pondasi rumah.

Anda memutuskan menggunakan godam untuk memecahkannya. Nah..., keputusan itu sebenarnya hasil musyawarah para anggota yang berjalan super-sekian detik dalam diri Anda.

Ketika Anda akan memecahkan batu itu, tangan

Anda menyatakan pendapat: "Saya tidak mampu memecahkannya, butuh tenaga yang lebih kuat, mungkin kaki bisa."

Lalu, kaki menjawab: "Saya pun tak mampu, batu ini terlalu keras. Bagaimana kalau memakai godam, dan yang bisa memegang godam adalah tangan. Saya kaki akan membantu menopang saja."

"Baik, saya akan lakukan," kata tangan. "Namun agar pukulan godam tepat sasaran, saya minta agar mata jeli melihat posisi batu," pinta tangan kepada mata.

Lalu mata menjawab: "Saya akan lakukan yang terbaik, namun agar saya bisa tetap melihat dengan jeli, saya butuh pelindung dari percikan batu. Saya butuh helm dengan pelindung muka yang kuat," ujar mata. Begitulah musyawarah itu berjalan sangat cepat.

Musyawarah sejenis tentu juga terjadi di setiap keputusan tindakan Anda. Allah SWT memberikan mekanisme syuro (musyawarah) dalam diri Anda ini begitu otomatis, dan berjalan dengan sangat cepat. Ini anugerah yang luar biasa.

Dewan berupa tubuh Anda memberikan pelajaran, bahwa cermat, tepat, dan akuratlah dalam mengambil kebijakan dan keputusan tindakan. Apalagi menyangkut aspirasi dan hajat hidup orang banyak.

Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas sehari-hari, mekanisme berunding itu saya jalankan secara serius. Saya ingin memastikan bahwa setiap anggota menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Saya ingin agar di setiap keputusan ada suara rakyat. Ada aspirasi yang benar-benar tersalurkan. Ada manfaat yang harus diterima rakyat.

Kadang di tengah lelah persidangan ada yang nyeletuk: "Udahlah Kang langsung ketuk saja, tidak perlu dibahas panjang lebar." Tentu saja saya tidak mengikutinya.

Malu rasanya pada dewan tubuh ini, jika kita asal mengambil keputusan. Jika tubuh saja cermat, maka dengan segala potensi kemanusiaan yang kita miliki, kita harus lebih dewan dari tubuh. Apalagi ada amanah rakyat di dalamnya.



SEKRETARIS DPRD DAN SELURUH PEGAWAI



Ikin Asikin, S.Sos., M.Si.
Sekretaris DPRD Kab. Cirebon



Wawan Siswandar, SE, M.Si.
(PI) Kabag Umum DPRD Kab. Cirebon /
Kabag Keuangan DPRD Kab. Cirebon



Drs. Raden Chaldir Susilaningrät
Kabag Persidangan DPRD Kab. Cirebon



Drs. H. Sucipto, MM.
Kabag Perundang-undangan DPRD Kab. Cirebon

Mengucapkan Selamat

Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1441 H



PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON



H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)



Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)



Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)



Drs. H. Subhan
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)



Mengucapkan Selamat

Menunaikan Ibadah Puasa
1 Ramadhan 1441 H